KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:5806-8969-2478-9999

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693104/2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(11)	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
3. Provinsi	:	(15)	KALIMANTAN SELATAN
4. Kode/Nama Satker	:	(693104)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN
Sebesar	:	Rp. 1.276.294.000	(SATU MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.276.294.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANJARMASIN (045) Rp. 1.276.294.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693104/2025

DS:5806-8969-2478-9999

Satker : (693104) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	139.308.000
BB.7133	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	139.308.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.136.986.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	1.136.986.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693104/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5806-8969-2478-9999

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (693104) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi				139.308.000
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah				139.308.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan				
		2. 02	Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		1,00	Rekomendasi Kebijakan	69.800.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah		1.00	Rekomendasi Kebijakan	69.800.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	69.508.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah		1.00	Lembaga	69.508.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				1.136.986.000
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah				1.136.986.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah				
		2. 01	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi				
		3. 01	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah				
		4. 02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		10,00	Lembaga	88.574.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah		10.00	Lembaga	88.574.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		7,00	Kelompok Masyarakat	187.170.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah		2.00	Kelompok Masyarakat	67.320.000
		02 BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum		5.00	Kelompok Masyarakat	119.850.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693104/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5806-8969-2478-9999

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (693104) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

				Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			Kelompok Masyarakat	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		1,00	Orang	52.141.000
Rincian Output		:	01 BIB.001	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah		1.00	Orang	52.141.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		7,00	Lembaga	85.494.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah		7.00	Lembaga	85.494.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik		1,00	dokumen, Peta, Data	37.057.000
Rincian Output		:	01 BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah		1.00	dokumen	37.057.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	30.520.000
Rincian Output		:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum		1.00	Laporan	30.520.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		70,00	Orang	560.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	(PN)	70.00	Orang	560.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		9,00	Kelompok Masyarakat	96.030.000
Rincian Output		:	01 QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	(PN)	9.00	Kelompok Masyarakat	96.030.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693104/2025

DS:5806-8969-2478-9999

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (693104) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	1.276.294.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.276.294.000			(2) RPLN	US$ 0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693104/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:5806-8969-2478-9999

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (693104) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693104	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN**	**-**	**1.261.294**	**15.000**	**-**	**-**	**1.276.294**		
135.11.BB	**Program Pembentukan Regulasi**	**-**	**139.308**	**-**	**-**	**-**	**139.308**		
7133	**Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah**	**-**	**139.308**	**-**	**-**	**-**	**139.308**		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	-	69.800	-	-	-	69.800	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
01	RM	-	69.800	-	-	-	69.800	045@	
7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	69.508	-	-	-	69.508	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
01	RM	-	69.508	-	-	-	69.508	045@	
135.11.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**1.121.986**	**15.000**	**-**	**-**	**1.136.986**		
7136	**Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah**	**-**	**1.121.986**	**15.000**	**-**	**-**	**1.136.986**		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	73.574	15.000	-	-	88.574	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693104/2025

DS:5806-8969-2478-9999

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (693104) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	73.574	15.000	-	-	88.574	045@	
7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	-	187.170	-	-	-	187.170	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
01	RM	-	187.170	-	-	-	187.170	045@	
7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	-	52.141	-	-	-	52.141	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
01	RM	-	52.141	-	-	-	52.141	045@	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	-	85.494	-	-	-	85.494	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
01	RM	-	85.494	-	-	-	85.494	045@	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik	-	37.057	-	-	-	37.057	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
01	RM	-	37.057	-	-	-	37.057	045@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693104/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:5806-8969-2478-9999

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (693104) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	30.520	-	-	-	30.520	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
01	RM	-	30.520	-	-	-	30.520	045@	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	560.000	-	-	-	560.000	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
01	RM	-	560.000	-	-	-	560.000	045	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	-	96.030	-	-	-	96.030	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
01	RM	-	96.030	-	-	-	96.030	045	
	JUMLAH	**-**	**1.261.294**	**15.000**	**-**	**-**	**1.276.294**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693104/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:5806-8969-2478-9999

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (693104) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**693104**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	43.914	157.015	172.460	92.884	156.596	87.362	103.890	147.839	138.865	110.868	64.601	1.276.294
		BELANJA BARANG	0	28.914	157.015	172.460	92.884	156.596	87.362	103.890	147.839	138.865	110.868	64.601	1.261.294
		BELANJA MODAL	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	135.11.BB.7133	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	0	3.199	0	3.804	18.011	4.550	16.573	58.054	19.239	15.878	0	139.308
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	3.199	0	3.804	18.011	4.550	16.573	58.054	19.239	15.878	0	139.308
	135.11.BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	43.914	153.817	172.460	89.080	138.584	82.812	87.317	89.785	119.625	94.990	64.601	1.136.986
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	28.914	153.817	172.460	89.080	138.584	82.812	87.317	89.785	119.625	94.990	64.601	1.121.986
		53 BELANJA MODAL	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693104/2025
IV A. B L O K I R

DS:5806-8969-2478-9999

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [15] KALIMANTAN SELATAN
Kode dan Nama Satker : [693104] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
693104	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN**		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	219.077
	52 Belanja Barang	Rp.	219.077
135.11.BB	**Program Pembentukan Regulasi**		
7133	**Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah**		
7133.ABD	**Kebijakan Bidang Hukum dan HAM**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	15.467
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	3.375
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7133.BDB	**Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	16.611
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.925
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	7.826
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
135.11.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		
7136	**Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah**		
7136.BDB	**Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	7.403
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	450
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	20.415
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.BDD	**Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	34.010
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	20.175
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.BIB	**Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	21.966
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693104/2025
IV A. B L O K I R

DS:5806-8969-2478-9999

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [15] KALIMANTAN SELATAN
Kode dan Nama Satker : [693104] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.575 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7136.BIC	**Pengawasan dan Pengendalian Lembaga**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.354 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 600 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.BMA	**Data dan Informasi Publik**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.320 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 525 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.FAE	**Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.480 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 600		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693104/2025
IV B. C A T A T A N

DS:5806-8969-2478-9999

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [15] KALIMANTAN SELATAN
Kode dan Nama Satker : [693104] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001